

OMBUDSMAN

Jadi Pembicara Indo-Pacific Endeavour 2023, Kapolres Tanjung Perak Sampaikan Peran Kepemimpinan Polisi Perempuan

Achmad Sarjono - SURABAYA.OMBUDSMAN.CO.ID

Aug 2, 2023 - 12:23



SURABAYA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Herlina menjadi pembicara dalam seminar internasional Indo-Pacific Endeavour (IPE) 2023 bertajuk Perempuan, Perdamaian dan Keamanan pada Selasa (1/8).

Bertempat di dalam kapal perang Australia HMAS ANZAC/FH 150 yang tengah

bersandar di Dermaga Jamrud Utara, AKBP Herlina menyampaikan mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam institusi Polri.

Menurut lulusan Seba PK Polwan 1997 ini, ada 6 aspek kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yakni, pengetahuan, pemahaman, kemampuan, value, attitude, dan interest. Dengan kemampuan tersebut, maka tujuan institusi ke depan dapat dicapai dengan cepat dan tepat.

"Seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan institusi. Perjalanan mencapai tujuan yang diinginkan tersebut di antaranya membutuhkan pengetahuan, pengalaman, intuisi, dan koneksi yang dimiliki oleh seorang pemimpin," terang AKBP Herlina.

Selain itu, tambah dia, seorang pemimpin juga memiliki peran untuk meminimalkan gap yang ada dengan cara melakukan proses problem solving terhadap permasalahan yang terjadi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

"Pemimpin terkadang dihadapkan pada situasi di mana pemimpin diharuskan untuk mengambil keputusan yang cepat, sehingga keempat aspek pendukung seperti pengetahuan, pengalaman, intuisi, dan koneksi dapat membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat," paparnya.

Meski demikian, Herlina tak memungkiri bahwa wanita yang menduduki jabatan penting di pemerintahan selalu disorot. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari persepsi peranan gender yang telah tertanam lama di masyarakat.

Yakni, anggapan perempuan adalah lebih lemah secara fisik dibandingkan dengan laki-laki, sehingga kurang produktif. Bahkan memunculkan persepsi profesi feminim atau pekerjaan perempuan. Alhasil ada stereotype terhadap pekerjaan tertentu yang bersifat maskulin atau feminim.

"Meskipun saat ini sudah banyak wanita yang mengambil posisi sebagai pemimpin, namun perlu juga disadari bahwa kesempatan bagi perempuan untuk mengisi posisi kepemimpinan masih terbatas," kata Herlina.

Pandangan tersebut pun diperkuat dengan fakta seperti misalnya, dari 39 kapolres di Jawa Timur saat ini, hanya ada satu perempuan yang mendapatkan jabatan tersebut.

Walau begitu, Herlina memberikan contoh agar pemimpin perempuan di suatu institusi tetap menyajikan peranan yang optimal dan mampu untuk terus bertarung.

Salah satunya dengan menjadikan fungsi preemtif, preventif, dan represif di dalam institusi Polri sebagai sebuah tanggung jawab.

"Seorang pemimpin sebaiknya tidak menganggap ketiga fungsi tersebut menjadi opsi bagi perempuan dalam institusi kepolisian. Namun sebagai pemimpin, ketiga fungsi itu harus dianggap sebagai tanggung jawab, bukan pilihan," tegasnya.

Terakhir, dalam presentasinya Herlina mengutip pesan motivasi dari politisi sekaligus aktivis Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, yang mengatakan the choice we make are ultimately our responsibility (pilihan yang kita buat pada

akhirnya adalah tanggung jawab kita).

"Pilihan yang kita ambil dalam hidup merupakan tanggung jawab kita. Sama halnya dalam menjadi pemimpin, itu merupakan sebuah pilihan. Maka dari itu, penting untuk melakukan yang terbaik dari setiap pilihan hidup yang kita ambil," pungkas mantan Kasatbinmas Polrestabes Surabaya ini.

Dalam kegiatan seminar internasional tersebut turut dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia Fiona Hoggart, Captain Patrol Boat Melanie Verho, Kolonel Dewi, anggota polwan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, anggota kowal Lantamal V Surabaya, perwakilan perempuan Basarnas, dan perwakilan dari Lapas Surabaya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi HMAS ANZAC Indo-Pacific Endeavour 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak, Koarmada II Surabaya, Kodiklatal Surabaya, Polairud Polda Jatim, Syahbandar Surabaya, Bea Cukai Surabaya, Imigrasi Surabaya, dan perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya. (*)